

KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS TERHADAP PENERIMAAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

Odha Adhitama, Bambang Santoso, Riyanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Email, odha_bulkers@yahoo.com

Abstract: *Oil and Gas Sector Contribution to Regional Income in Order to Improve Local Development in the Bojonegoro District.* Oil and gas sector is one of the natural resources and functions that have important influence on the country as well as producing regions. Bojonegoro is one area that has the very big potential for oil and gas sector to make the area as one of the areas of exploration and exploitation. The existence of oil and gas in Bojonegoro give much influence and contribute to the growth of regional income and regional development in Bojonegoro. Regarding with that, this study aims to describe the contribution of the oil and gas sector to the reception area in order to improve regional development and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of the management of the oil and gas sector in Bojonegoro. This study used a descriptive research method with a qualitative approach. This research was conducted in the Revenue Office and Natural Resources Section Bojonegoro. These results indicate that the oil and gas sector's contribution to the Bojonegoro is very large, which increases the reception area through the DBH and the Regional Balance Fund, regional development drive, and the employment. In this case, the oil and gas sector has proven its contribution to regional development Bojonegoro

Keywords: *contribution, oil and gas, acceptance and regional development*

Abstrak: Kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Sektor migas merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi dan pengaruh sangat besar terhadap negara maupun daerah penghasil. Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sektor migas sangat besar menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu daerah eksplorasi dan eksploitasi. Keberadaan migas di Bojonegoro banyak berpengaruh dan berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah dan pembangunan daerah Bojonegoro. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sektor migas di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi sektor migas terhadap Bojonegoro sangat besar, yaitu meningkatkan penerimaan daerah melalui DBH dan Dana Perimbangan Daerah, penggerak pembangunan daerah, dan membuka lowongan pekerjaan. Dalam hal ini, sektor migas telah terbukti kontribusinya terhadap pembangunan daerah Bojonegoro.

Kata Kunci: kontribusi, sektor migas, penerimaan dan pembangunan daerah

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. salah satu sumber daya alam yang sangat potensial di Indonesia adalah sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas atau biasa disebut dengan migas. Migas sendiri merupakan salah satu sumber daya yang memiliki banyak fungsi dan pengaruh terhadap

daerah penghasil. Hal tersebutlah yang menjadikan migas menjadi salah satu potensi yang tinggi nilainya. Potensi migas sendiri tersebar di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi migas sangat besar. Bojonegoro yang merupakan kota atau kabupaten kecil dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang

rendah. Sejarah Bojonegoro menunjukkan bahwa daerah tersebut pernah menjadi salah satu daerah miskin di Jawa Timur. Kondisi tersebut karena beberapa faktor yang salah satunya adalah mininya pendapatan atau penerimaan daerah.

Rendahnya penerimaan daerah adalah faktor utama terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut akan berpengaruh juga terhadap pembangunan daerah yang pada akhirnya juga akan mengalami penurunan. Kondisi tersebutlah yang menjadikan Bojonegoro menjadi salah satu daerah miskin di Jawa Timur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan hingga evaluasi daerahnya. Kewenangan tersebut menuntut agar pemerintah daerah dapat mengelola dan meningkatkan perkembangan daerahnya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah daerah harus mampu menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan daerahnya sendiri agar terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut (Fauzan, 2006, h.227).

Keberadaan sektor migas tersebut sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomoer 23 Tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Perda tersebut secara runtut dan lengkap menjelaskan tentang tanggungjawab, hak, kewajiban dan larangan sektor migas terhadap Kabupaten Bojonegoro. Perda adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam proses pemanfaatan dan pengolahan dari keberadaan dan pengaruh sektro migas di Bojonegoro. Hasil produksi migas yang di hasilkan akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah dialokasikan pemerintah pusat berdasarkan hasil produksi di setiap tahunnya. Semakin tinggi produksi migas maka akan semakin tinggi pula alokasi DBH dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Kondisi DBH tersebut juga akan berpengaruh terhadap dana perimbangan daerah yang terdiri dari DBH pajak, DBH non pajak/SDA, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Peningkatan dana perimbangan daerah tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi APBD daerah. Karena ketika dana perimbangan daerah mengalami peningkatan maka APBD daerah juga akan mengalami peningkatan. Pada kenyataannya hasil produksi

migas terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan hasil produksi tersebut tidak terlepas dari tingginya potensi migas yang ada di Bojonegoro. Secara langsung peningkatan hasil produksi migas tersebut dapat berpengaruh besar terhadap peningkatan kondisi penerimaan daerah. Disisi lain peningkatan hasil produksi tersebut setidaknya juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah di Bojonegoro. dari uraian tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui kontribusi dari sektor migas terhadap peningkatan penerimaan daerah dan peningkatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian tentang kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Tinjauan Pustaka

Desentralisasi secara umum merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dasar dari sistem desentralisasi adalah untuk memudahkan pemerintah dalam mengatur dan mensejahterakan masyarakatnya melalui pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah lebih dekat jangkauannya kepada masyarakat sekitar dari pada pemerintah pusat. Sehingga keputusan bisa diambil secara cepat karena pemerintah daerah lebih mengerti kondisi masyarakat sekitar.

Pemerintah daerah menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia yang didasarkan pada sistem desentralisasi. Otonomi daerah sendiri memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan, kemampuan serta kebutuhan daerah tersebut.

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (pasal 1 butir 55 PP No. 58 Tahun 2005). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD. Dalam peraturan perundang-undangan, sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pendapatan Lain-lain

Pembangunan adalah salah satu bentuk dari sebuah perkembangan ataupun perbaikan dari sesuatu hal yang belum sempurna. Banyak pengertian maupun definisi mengenai pembangunan, secara umum pembangunan sendiri merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki maupun memperbarui sesuatu melalui perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara teori pembangunan sendiri diartikan sebagai usaha untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh negara maupun daerah miskin maupun terbelakang atau yang sedang berkembang. Menurut Siagian (Suryono, 2010, h.46) Berbicara tentang pembangunan suatu wilayah tidak bisa terlepas dari perencanaan pembangunan itu sendiri. Menurut Nugroho dan Dahuri (2012, h.12) pengertian pembangunan wilayah atau daerah adalah konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas pembangunan wilayah atau daerah diartikan sebagai suatu upaya yang merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa harus merusak pemenuhan kebutuhan mendatang. Berdasarkan prinsip tersebut pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek kebijakan yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan. Tiga aspek tersebut merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Karena memang fokus dari pembangunan berkelanjutan adalah pada pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi

pembangunan yang dilakukan harus juga memprioritaskan pada masa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan ini memiliki tiga tujuan utama dalam proses pembangunan yang sifatnya berkelanjutan yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan Ekonomi
Diartikan sebagai tujuan pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan perekonomian untuk masa yang akan datang. Tujuan ekonomi ini terkait dengan masalah efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Tujuan Ekologi
Sistem keberlanjutan berorientasi pada lingkungan harus mampu menjaga kestabilan sumber daya alam yang ada. Di samping itu proses eksploitasi sumber daya alam yang berdampak negatif juga harus bisa dihindari dari proses pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Tujuan Sosial
Pembangunan yang berprioritas pada sosial dapat diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender dan akuntabilitas politik. Tujuan tersebut terkait pada masalah pengurangan kemiskinan dan pemerataan.

Minyak bumi dan gas atau biasa disebut dengan migas, merupakan salah satu sumber daya alam atau hasil bumi yang saat ini menjadi perhatian khusus dari negara-negara di dunia. Kegunaan dan manfaat dari migas sendiri sangatlah banyak dan hampir seluruh negara menggunakan dan membutuhkan migas tersebut. Tetapi yang menjadi kendala adalah keberadaan migas tersebut tidak merata ke seluruh pelosok dunia, melainkan hanya di beberapa belahan dunia. Salah satu penghasil migas terbesar hingga saat ini adalah di kawasan timur tengah. Dalam proses pengelolaan migas sendiri ada lima tahapan kegiatan yaitu, eksploitasi, produksi, pengolahan, transportasi dan pemasaran. Kemudian lima kegiatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan hulu dan kegiatan hilir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini yaitu :

1. Kontribusi sektor migas terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro:
 - a. Kontribusi sektor migas terhadap penerimaan DBH
 - b. Kontribusi Sektor migas terhadap penerimaan dana perimbangan daerah
 - c. Kontribusi sektor migas dalam meningkatkan APBD Bojonegoro
2. Kontribusi migas di sektor lain dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah
 - a. Penggerak pembangunan daerah
 - b. Membuka lapangan pekerjaan
 - c. Kontribusi migas melalui CSR
3. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan sektor migas dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.
 - a. Faktor Pendukung: Potensi sumber daya alam yang tersedia
 - b. Faktor Penghambat: Terbatasnya wewenang pemerintah daerah terhadap pengelolaan sektor migas

Situs penelitian ini adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Peneliti beranggapan bahwa di kantor tersebut peneliti bisa mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti untuk menjelaskan secara komperhensif bagaimana kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Dalam rangka mendapatkan data sesuai fokus penelitian, maka peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh di lapangan dianalisa menggunakan metode analisa interaktif dari Miles Hubberman, yaitu peneliti dituntut untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Daerah ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah dan merupakan salah satu daerah bagian utara dari Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar penduduk Bojonegoro menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah yang merupakan daerah perbukitan, menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu daerah yang sukses dalam bidang kehutanan dan pertanian. Terbukti dengan 40 persen wilayah Bojonegoro merupakan kawasan

hutan jati yang dikuasai oleh negara melalui Perhutani. Disamping itu Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi SDA berupa minyak bumi yang melimpah. Kondisi tersebutlah yang menjadikan Bojonegoro saat ini menjadi daerah eksplorasi dan eksploitasi migas. Keberadaan sektor migas di Bojonegoro sedikit banyak telah memberikan kontribusinya terhadap daerah.

1. Kontribusi Sektor Migas terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Bojonegoro

a. Kontribusi Sektor Migas terhadap Penerimaan DBH

Potensi sektor migas yang ada di Bojonegoro yang besar, berpengaruh besar terhadap daerah Bojonegoro. Pengaruh besar yang terlihat jelas adalah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro. Pengaruh sektor migas tersebut memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan Bojonegoro. Pengaruh tersebut dapat dirasakan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang di terima pemerintah daerah. Sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat bahwa penentuan DBH sektor migas yang diterima oleh Bojonegoro ditentukan oleh pemerintah pusat. Penentuan tersebut disesuaikan dengan hasil produksi sektor migas di setiap tahunnya. Pembagian DBH tersebut juga telah di atur dengan berbagai ketentuan mulai dari penerima yang berhak atas DBH tersebut hingga jumlah nominal yang akan diterima.

b. Kontribusi Sektor Migas terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Daerah

Pengaruh sektor migas terhadap daerah sangatlah besar terutama di bidang pendapatan daerah. Berawal dari hasil produksi sektor migas yang terus mengalami peningkatan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan DBH migas yang diperoleh daerah. Dari data penerimaan DBH yang didapat Bojonegoro di setiap tahunnya membuktikan bahwa sektor migas berkontribusi besar terhadap penerimaan DBH yang diperoleh oleh daerah. Perolehan DBH yang diterima oleh daerah sangat besar dan hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kondisi APBD Kabupaten Bojonegoro. DBH migas merupakan salah satu penerimaan daerah yang termasuk dalam penerimaan daerah dalam bidang perimbangan atau salah satu penerimaan dari dana perimbangan daerah. Dana perimbangan sendiri merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari DBH hasil pajak, DBH bukan pajak/SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi pada

dasarnya DBH adalah salah satu pemasuk penerimaan dana perimbangan yang nantinya juga menjadi salah satu bagian dari penerimaan terhadap APBD Bojonegoro. Ketika penerimaan DBH mengalami peningkatan, dapat dipastikan juga bahwa kondisi dana perimbangan daerah Bojonegoro juga akan mengalami peningkatan.

c. Kontribusi Sektor Migas Dalam Meningkatkan APBD Bojonegoro.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diketahui, anggaran daerah atau yang lebih lazim disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah, oleh karenanya anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya meningkatkan kapabilitas, efektivitas dan pembangunan pemerintah daerah.

Kondisi DBH yang berasal dari sektor migas di setiap tahunnya terus mengalami peningkatan terhitung dari tahun 2008. Meningkatnya DBH tersebut juga berpengaruh terhadap kondisi dana perimbangan daerah yang juga mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan DBH. Peningkatan dana perimbangan tersebutlah yang berpengaruh besar terhadap meningkatnya kondisi APBD Bojonegoro.

2. Kontribusi Migas di Sektor Lain dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah

a. Penggerak Pembanguna Daerah

Meningkatnya pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh meningkatnya hasil produksi migas setiap tahunnya berpengaruh terhadap perkembangan daerah. Pengaruh yang paling terlihat adalah pada perkembangan pembangunan yang ada di Bojonegoro. Peningkatan pembangunan daerah Bojonegoro dipengaruhi dari kondisi APBD Bojonegoro yang mengalami peningkatan secara signifikan. Pembangunan daerah terlihat jelas setelah adanya sektor migas di Bojonegoro. Sebelum adanya sektor migas di Bojonegoro, pembangunan daerah sangat minim dan hanya terpusat di pusat kota. Semenjak adanya migas pembangunan diperluas hingga tingkat desa melalui program Anggaran Dana Desa (ADD) dengan tingkat pembangunan disetiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebutlah yang menjadikan Bojonegoro saat ini menjadi salah satu daerah yang tingkat pertumbuhan dan perkembangan daerahnya

sangat tinggi dibandingkan daerah lainnya yang ada di Jawa Timur.

b. Membuka Lapangan Pekerjaan

Keberadaan sektor migas yang ada di Bojonegoro merupakan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menyikapi keberadaan sektor migas tersebut. Kesempatan tersebut harus dapat dirasakan baik untuk daerah maupun langsung terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga harus dapat merasakan pengaruh langsung dari adanya sektor migas tersebut baik pengaruh terhadap perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat sekitar. Sektor migas di Bojonegoro juga berkontribusi terhadap masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja di dalam industri migas tersebut. Kesempatan tersebut harus bisa diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan terus melakukan peningkatan mutu dan kualitas SDM Bojonegoro agar dapat terus dipromosikan untuk dapat direkrut di industri migas tersebut sebagai tenaga kerja. Jadi keberadaan sektor migas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui lapangan pekerjaan di sektor migas tersebut.

c. Kontribusi Sektor Migas Melalui CSR

Kontribusi sektor migas terhadap daerah sangatlah besar baik yang melalui pemerintah daerah dengan kebijakan dan perencanaan daerah tersebut maupun langsung dari perusahaan terkait yang bergerak dibidang migas. Melalui program CSR perusahaan juga turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Proses pelaksanaan CSR sendiri langsung dilakukan dan menjadi tanggungjawab penuh perusahaan terkait. Bentuk kegiatannya pun juga jelas mulai dari, perbaikan jalan, jembatan, trotoar, peningkatan pendidikan, kesehatan dan sosial. Semua kegiatan tersebut adalah salah satu tanggungjawab perusahaan atas keberadaannya di lingkungan masyarakat sekitar. Program CSR tersebut terbukti telah berkontribusi cukup besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di area industri migas.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Sektor Migas dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro

a. Faktor Pendukung: Potensi Sumber Daya Alam yang Tersedia

Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam yang ditemukan di Bojonegoro sangatlah banyak dan beragam. Akhir-akhir ini yang menjadi pusat perhatian adalah sumber

daya alam berupa migas yang terdapat di Bojonegoro. Potensi migas yang terkandung di Bojonegoro sangatlah besar, dan hal tersebut yang menjadikan Bojonegoro sebagai daerah potensial. Saat ini Kabupaten Bojonegoro juga disebut sebagai daerah migas dengan cadangan minyak sekitar 600 juta – 1,4 milyar barel dan cadangan gas sekitar 1,7 – 2 triliun kaki kubik terbesar di Indonesia. Berhasilnya pengelolaan sektor migas yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap pembangunan daerah tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Diantara sektor lain, potensi sumber daya alam di sektor migas merupakan sektor unggulan saat ini yang ada di Bojonegoro. Dapat dipastikan bahwa hampir 20% kandungan migas Indonesia berada di wilayah Bojonegoro. Tingginya kandungan dan potensi migas yang ada di Bojonegoro merupakan faktor utama dari proses pengembangan dan pengelolaan sektor migas tersebut. Terbukti sejak tahun 2008 hasil produksi migas yang ada di Bojonegoro terus mengalami peningkatan secara signifikan. Dari hasil survei pihak perusahaan dinyatakan bahwa dari sekian titik potensi sumber minyak dan gas bumi yang terkandung di wilayah Bojonegoro, masih banyak titik potensial yang belum dilakukan eksplorasi dan eksploitasi untuk pengelolaannya. Titik-titik potensial tersebut hampir tersebar di wilayah Bojonegoro bagian barat dan utara. Masih banyaknya titik-titik potensial yang belum dikerjakan, membuktikan bahwa kandungan migas yang ada di Bojonegoro sangat melimpah.

b. Faktor Penghambat: Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Sektor Migas

Dalam proses pengembangan serta pengelolaan sektor migas dan meningkatkan pembangunan daerah khususnya di bidang pendapatan banyak hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah salah satunya adalah terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sektor migas tersebut. Proses pengelolaan dan perkembangan sektor migas merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat. Bahkan dalam proses perjanjian dan kesepakatan dengan perusahaan terkait juga menjadi wewenang penuh pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki wewenang yang sangat terbatas dalam proses pengelolaan sektor migas meskipun sektor migas tersebut berada di wilayah Bojonegoro. Pemerintah daerah hanya diberi kewenangan dalam urusan perizinan saja. Untuk

keterlibatan langsung dalam proses pengembangan dan pengelolaan migas tidak diberikan wewenang sama sekali. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan pemerintah daerah dalam turut serta mengembangkan sektor migas yang ada di Bojonegoro.

Kesimpulan

Keberadaan sektor migas di Bojonegoro sangat berpengaruh besar terhadap pengembangan dan pembangunan daerah. Sektor migas memiliki banyak kontribusi dalam pembangunan daerah diantaranya adalah, meningkatkan pendapatan daerah, penggerak pembangunan daerah dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Secara tidak langsung kontribusi migas yang terlihat jelas adalah terhadap penerimaan daerah. Peningkatan penerimaan daerah tidak terlepas dari kondisi hasil produksi migas yang terus mengalami peningkatan. Meningkatnya pendapatan daerah juga berpengaruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang juga mengalami peningkatan. Proses pembangunan sendiri tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan ataupun program-programnya, tetapi perusahaan sektor migas juga terlibat langsung dalam proses pembangunan melalui program CSR. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan sektor migas di Bojonegoro berkontribusi besar terhadap daerah Bojonegoro, baik terhadap pendapatan daerah maupun terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Saran

Keberadaan sektor migas di Kabupaten Bojonegoro harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah. Jangan sampai pemerintah terlena dengan keberadaan dan pengaruh sektor migas yang sangat besar terhadap daerah. Pemerintah harus mulai memikirkan antisipasi untuk kedepannya. Karena potensi migas di Bojonegoro pasti nantinya akan mengalami penurunan. Dari kemungkinan tersebut pemerintah daerah harus memiliki antisipasi ketika sektor migas sudah tidak bisa berkontribusi terhadap daerah. Salah satu solusi yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan investasi daerah sebagai tabungan daerah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk mendatang.

Pemerintah daerah juga harus memikirkan kualitas dan mutu masyarakat sekitar. Karena hal tersebut adalah salah satu faktor pendukung dalam mempertahankan perkembangan dan pembangunan daerah. Semakin tinggi kualitas

dan mutu masyarakat maka semakin tinggi pula potensi masyarakat produktif. Solusi yang dapat diberikan salah satunya dengan meningkatkan

taraf pendidikan masyarakat sekitar demi mendukung kualitas masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2010), **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Revisi**. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Fauzan, Muhamad. (2006). **Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**. Yogyakarta, Rampi
- Moleong, Lexy J. (2002). **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul M.R. (2006). **Desentralisasi dan Pemerintah Daerah**. Malang, Bayumedia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Suparmoko. (2002). **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama**. Yogyakarta, Andi.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri.